



RENCANA KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS SOSIAL

JL. JEND SUDIRMAN (KOMPLEKS
PERKANTORAN
PEMKAB. LUWU) BELOPA
TELEPON/FAX (0471) 3316049
BELOPA-KAB. LUWU 91994
e-Mail : Dinsos2018@gmail.com

PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Luwu dapat diselesaikan. Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Luwu dan RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024.

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara konsisten dan optimal akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu Dinas Sosial Kabupaten.

Salah satu tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan di bidang sosial dan memberikan informasi sekaligus sebagai bahan evaluasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian Renja ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Belopa, 24 September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

JOHAN DAIDO, S. Sos., M. Si

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP. 196712271991031011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
1.1 Landasan Hukum.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	59
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Sosial Kab. Luwu	26
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	33
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	45
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	49
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Unit Kerja Penanggung Jawab serta lokasi	50
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	60
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

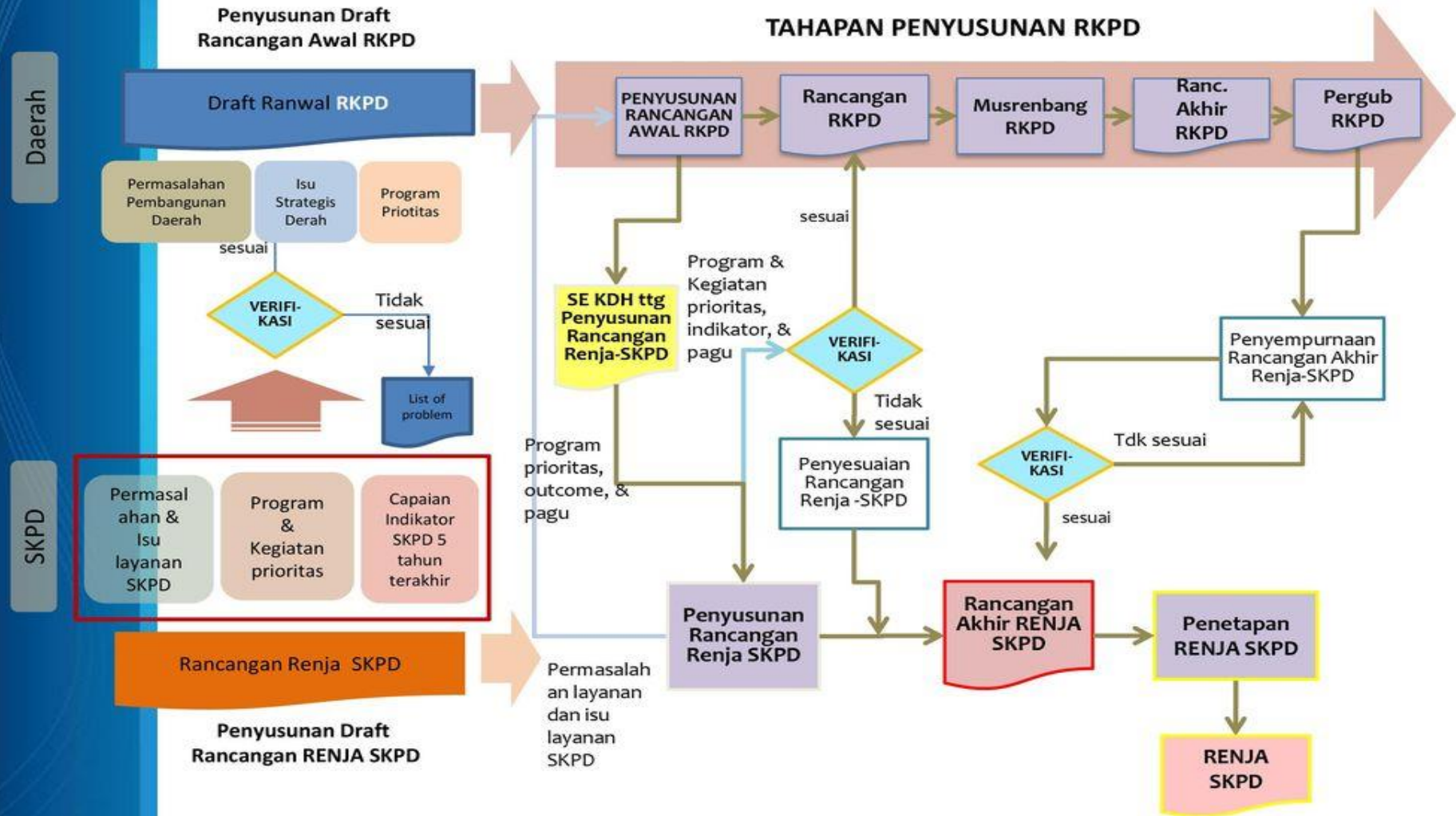
Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Perubahan Dinas Sosial Tahun 2019-2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Dinas Sosial merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu

khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Renja Kerja 2024 sebagai upaya mendukung terwujudnya visi Kabupaten Luwu yaitu **“Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, dalam Nuansa Religi”**.



KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja perangkat daerah antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) lembaran negara republic Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 9 Lembaga Negara Tahun 2022 Nomor 4, perubahan lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
 18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 151 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Luwu.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2022;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019-2024;
 22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini digunakan untuk menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya pada tahun berkenan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut diatas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial dan sistematika penulisan.

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

Berisikan evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial serta memuat Program dan Kegiatan.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan pendanaan indikatif renja Dinas Sosial Kab. Luwu tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025

- **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang memuat indikator Keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Sosial selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Program/kegiatan yang telah dicapai pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah : **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) tahun 2024 sebesar Rp. 3.163.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 00,- (0 %)

a. Belanja Langsung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan : 100 %
Anggaran : Rp. 13.882.901,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Jassa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
Anggaran : Rp. 1.185.270,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
Anggaran : Rp.1. 226.155,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
Anggaran : Rp. 1.040.155,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
Anggaran : Rp. 377.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
Anggaran : Rp. 7.530.155,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Lembur

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
Anggaran : Rp. 3.163.071.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
- Belanja Tunjangan Beras PNS
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp. 153.960.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan

c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp. 0,-
 Realisasi : Rp. 1.993.000,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp 13.882.907,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp 6.451.627,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Jasa Penelolan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp 1.328.600,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp 5.620.000,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
- Belanja Natura dan Pakan-Natura

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelesaian Pekerjaan : 0 %
 Anggaran : Rp 2.080.096,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 14.400.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 1.062.500,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 116.453.600,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa Surat Menyurat

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 14.372.426,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Jasa Tenaga Caraka

b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya air dan Listrik

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 80.074.837,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Tagihan Listrik
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 189.600.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- Belanja Jasa Tenaga Keamanan

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 62.640.763,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengekel
- Belanja Jasa Tenaga Supir
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 6.510.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

A. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
Anggaran : Rp 6.510.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor

- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-kantor dan cover
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak
 - Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 'Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- b. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)**

Penyelesaian Pekerjaan : 0%

Anggaran : Rp 10.997.121,-

Realisasi : Rp. 0,-

Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Honorium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

A. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

a. Penyediaan Permakanan

Penyelesaian Pekerjaan : 0%

Anggaran : Rp 11.667.576,-

Realisasi : Rp. 0,-

Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

- Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- b. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga**
- Penyelesaian Pekerjaan : 0%
- Anggaran : Rp 8.252.016,-
- Realisasi : Rp. 0,-
- Prosentase Realisasi : 0 %
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- c. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial**
- Penyelesaian Pekerjaan : 0%
- Anggaran : Rp 5.583.059,-
- Realisasi : Rp. 0,-
- Prosentase Realisasi : 0 %
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- d. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan**
- Penyelesaian Pekerjaan : 0%
- Anggaran : Rp 10.977.903,-
- Realisasi : Rp. 0,-
- Prosentase Realisasi : 0 %
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

a. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Penyelesaian Pekerjaan : 0%

Anggaran : Rp 8.298.237,-

Realisasi : Rp. 0,-

Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Honorium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

4. PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

A. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Pekerjaan : 0%

Anggaran : Rp 39.028.564,-

Realisasi : Rp. 0,-

Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

- Belanja Sewa Hotel
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

b. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
 Anggaran : Rp 429.928.825,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- Belanja Bantuan sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

A. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Makanan

Penyelesaian Pekerjaan : 0%
 Anggaran : Rp 40.172.092,-
 Realisasi : Rp. 0,-
 Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer
- Belanja Natura dan Pakan-Natura
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

a. Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna siaga Bencana

Penyelesaian Pekerjaan : 0%

Anggaran : Rp 193.871.931,-

Realisasi : Rp. 0,-

Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
- Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana
- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

A. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Penyelesaian Pekerjaan : 0%

Anggaran : Rp 12.500.000,-

Realisasi : Rp. 0,-

Prosentase Realisasi : 0 %

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2024
PROPINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN LUWU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))					Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4		5	6		7		8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9		11 = (10/4)		
1	06				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	%		%	%		%		%	%	%		%		
1	06	01			Kegiatan Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Dok perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat	3	dok	3	Dok	2	Dok	2	Dok	%	Dok	3	Dok	2	100
1	06	01	2.01		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3	Dok	3	Dok	1	Dok	1	Dok	100	Dok	1	Dok	4	100
1	06	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	Dok	1	Dok	1	100
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA- SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	Dok	1	Dok	1	100
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	Dok	1	Dok	1	100
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA- SKPD yang disusun	1	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	Dok	1	Dok	1	100

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))					Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	06	01	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	OB	264	OB	396	OB	396	OB	100	OB	396	OB	34	150
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	264	Dok	3	Dok	3	Dok	3	Dok	100	Dok	3	Dok	3	100
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Lap keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	Lap	14	Lap	14	Lap	14	Lap	100	Lap	14	Lap	14	100
1	06	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 5	7	Jenis	7	Jenis	9	Jenis	9	Jenis	100	Jenis	9	Jenis	9	129
1	06	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	78	Unit	78	Unit	12	Unit	12	Unit	100	Unit	5	Unit	3	6
1	06	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10	Jenis	10	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	100	Jenis	11	Jenis	12	110
1	06	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	100	Jenis	3	Jenis	12	50
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	20	Jenis	20	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	100	Jenis	8	Jenis	12	40

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))					Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	06	01	2,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	50	Jenis	50	Jenis	55	Jenis	55	Jenis	100	Jenis	54	Jenis	12	108
1	06	01	2,1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	Jenis	3	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	Jenis	4	Jenis	3	133
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	105	Jenis	105	Jenis	98	Jenis	98	Jenis	102	Jenis	89	Jenis	180	85
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	06	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa	2500	Surat	2.918	Surat	1500	Surat	1667	Surat	90	Surat	1400	Surat	1400	56
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	100	Bln	12	Bln	12	100
1	06	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	192	OB	192	OB	228	OB	228	OB	100	OB	502	OB	25	261
1	06	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlahkendaraan dinas dan operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	19	Unit	18	Unit	28	Unit	19	Unit	147	Unit	19	Unit	19	100
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	11.345	M²	11.345	M²	11.345	M²	11.345	M²	100	M²	11.345	M²	11.345	100

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))					Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan LK3	70	KK	70	KK	75	KK	75	KK	100	KK	10	KK	20	14
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	03	2.01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di Daerah Kabupaten dari Titik Debarkasi	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	0	Org	0	Org	0	Org	0	Org	100	Org	7	Org	7	0
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))					Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pengemis di Luar Panti Sosial yang Tertangani														
1	06	04	2.01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual	6	Org	6	Org	2	Org	2	Org	100	Org	6	Org	5	100
1	6	04	2	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	133	Org	133	Org	133	Org	133	Org	100	Org	10	Org	1025	8
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	05	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penyelenggaraan layanan sosial terhadap anak- anak terlantar	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak telantar yang mendapatkan pemantauan	378	Org	378	Org	368	Org	368	Org	100	Org	368	Org	368	100
1	06	05	2.02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pengelolaan data fakir miskinnya	227	Desa/Kel	227	Desa/Kel	227	Desa/Kel	227	Desa/Kel	100	Desa/Kel	227	Desa/Kel	60000	100

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))			Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	6	05	2	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan Sembako Pangan	16.576	KPM	16.576	KPM	17.122	KPM	17.122	KPM	100	KPM	3477	KPM	60000	109
						Jumlah Mahasiswa pra sejatera yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	24.481	Org	4.481	Org	25.371	Org	25.371	Org	100	Org	369	Org	369	14
1	6	06			Program Penanganan Bencana	Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana lingkup kabupaten	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	6	06	2		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	6	06	2	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang disediakan kebutuhan makannya	159	Org	159	Org	908	Org	908	Org	100	Org	75	Org	80	47
1	06	06	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana lingkup kabupaten	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kampung siaga bencana	0	Layanan	0	Layanan	25	Layanan	25	Layanan	100	Layanan	300	Layanan	30	0
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana (tagana) yang siap tanggap darurat bencana	25	Layanan	25	Layanan	25	Layanan	25	Layanan	100	Layanan	30	Layanan	30	120
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	06	07	2.01		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2022))			Tareget Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Tareget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP yang dipelihara	8880	M²	8880	M²	8880	M²	100	M²	8880	M	1	100

Belopa, 01 September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL

JOHAN DAIDO, S. Sos., M. Si
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19671227 199103 1 011

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemerintah melalui Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya pemberian bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta rehabilitasi sosial.

Selain melakukan asistensi sosial melalui pemberian bantuan bagi KSM (Keluarga Sangat Miskin) penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Lanjut Usia terlantar (ASLUT), Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Program Perlindungan Sosial Anak (PPSA), juga diberikan pelayanan sosial melalui pemberdayaan dan pelayanan sosial luar panti yang berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial merupakan dua strategi yang harus sejalan, jika asistensi sosial yang dominan maka kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kemandirian penduduk miskin dan rentan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan berupa Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 18 Unit, pemberian peralatan kebutuhan kepada anak panti di 2 LKSA, pendampingan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 21.808 KK, melakukan pendampingan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 16,526 KPM, melakukan pelayanan sosial kepada korban bencana sebanyak 159 Jiwa, melakukan penanganan terhadap penyandang gangguan jiwa sebanyak 6 orang, serta melakukan pendampingan terhadap 150 orang penyandang disabilitas berat dan lansia. Sedangkan dalam upaya pemberdayaan PMKS Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama 30 Kelompok.

Tabel. 2.2

PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1	Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehab) yang terbina			8	8	8	8	8	8	9	9	
2	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial			100	100	100	100	-	75	100	100	
3	Jumlah kejadian bencana (kali)			35	35	168	159	22	24	159	159	
4	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat			30	40	39	45	29	29	45	45	
6	Jumlah PMKS yang tertangani			40.200	40.200	40.550	40.500	40.186	40.159	40.500	40.500	
7	Jumlah PMKS yang ada			50.431	51.484	50.484	78.172	51.484	51.484	78.792	78.792	
8	Persentase PMKS yang tertangani			79,71	78,08	80,32	51,81	78,06	78,00	51,40	51,40	
9	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun			40.000	45.000	47.000	50.000	40.529	41.830	62.000	65.000	
10	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial			50.431	51.484	50.484	78.172	51.484	51.484	78.792	78.792	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
11	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	80	79,32	87,41	93,10	63,96	78,72	81,25	78,69	82,50	
12	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis			500	500	459	459	300	357	200	200	
13	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis			25.216	25.742	25.242	39.086	25.742	25.742	39.396	39.396	
15	Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos			8	8	8	8	8	8	9	9	
16	Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos			8	8	8	8	8	8	9	9	
17	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Jumlah WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			-	-	120	220	0	0	220	220	
19	Jumlah WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			-	-	120	220	0	0	220	220	
20	Persentase WKSBM menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	60	-	-	100	100	0	0	100	100	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
21	Jumlah Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			200	200	550	500	186	159	500	500	
22	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			200	200	550	500	186	159	500	500	
23	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	
24	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten			160	160	100	100	6	8	100	100	
25	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten			200	200	200	200	186	40	200	200	
26	Persentase korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat skala kabupaten	80	80	80	80	50	50	3,23	20	50	50	
27	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			150	2.483	2.879	3.141	150	2.483	3.141	3.141	
28	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun			228	3.749	3.889	4.076	228	3.749	4.076	4.076	

No	Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
29	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	40	40	65,79	66,23	74,03	77,06	65,79	66,23	77,06	77,06	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.

Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis pelayanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang disampaikan secara langsung maupun lewat media cetak dan elektronik. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Acuan pelaksanaan pelayanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih baik (*better*), lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih sederhana (*more simple* dan *actual* (*newer*)). Perlunya SPM dimaksudkan untuk:

1. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang sosial.
2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/jasa kebutuhan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal sedangkan mutu pelayanan dasar

adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, ada 5 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.

Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang sosial dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja dinas.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan SPM sebagian besar sudah dilaksanakan, namun dari tahun 2011 urusan sosial mengenai penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota, yang meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota dan evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota, pelayanan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan di Dinas Sosial karena telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada dasarnya Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kabupaten Luwu secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial saja tetapi perlu dukungan instansi lain.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam

penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun faktor pengaruh sekaligus permasalahan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan SDM

Kondisi ini terjadi disebabkan kurangnya SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Luwu dan kurangnya perputaran pegawai yang seharusnya dapat menjadi penyegaran dan pengalaman. Secara kuantitas juga, masih kurang memadai sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan tertunda dari target waktu sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.

2. Alokasi anggaran

Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan seringkali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah diusulkan. Optimalisasi menjadi berkurang, disebabkan alokasi anggaran yang terbatas. Akibatnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang ada menjadi kurang optimal dalam mencapai indikator kinerja yang diharapkan.

3. Sarana dan prasarana

Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang secara langsung. Seringkali kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

TABEL. 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KAB. LUWU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikator (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	(6)	-7	-8	-9	-10	(11)	-12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	3.983.215.959	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	3.983.215.959	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100.00 %	38.516.860	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	12 Jenis	28.263.416	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	6 Dokumen	25.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4 Dok	14.085.701,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.250.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1.185.270,-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.250.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1.393.655,-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.230.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1.181.925,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.230.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dok	1.230.825,-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	1 Dokumen	4.054.860	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	4 Laporan	9.186.040	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	100.00 %	3.024.340.104	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	100 %	3.373.203.956	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah Orang komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	33 orang	2.905.500.104	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belopa	Jumlah Orang komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	34 Org	3.214.383.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	Jumlah dokumen yang diverifikasi	3 Dokumen	112.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belopa	Jumlah dokumen yang diverifikasi	3 Dok	153.960.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Belopa	Jumlah Dokumen peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	3 Dokumen	1.540.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Belopa	Jumlah Dokumen peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	3 Dok	1.169.343	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan bahan logistik kantor yang disediakan	14 Laporan	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Belopa	Jumlah Laporan bahan logistik kantor yang disediakan	14 Lap	3.691.613	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100.00 %	6.676.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	1 Jenis	6.510.127	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belopa	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	6.676.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	6.510.127	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	100.00 %	338.511.855	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian Administrasi umum Perangkat daerah	8 Jenis	200.173.528	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	3.000.925	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belopa	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Paket	2.822.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	32.685.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	20.073.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11 Jenis	5.859.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belopa	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11 Paket	9.561.250	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belopa	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3.500.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belopa	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	2.999.656	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	8 Eks	9.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belopa	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 Dokumen	14.400.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	54 Jenis	12.865.380	Penyediaan Bahan/Material	Belopa	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	54 Paket	25.841.722	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	4 Jenis	20.500.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belopa	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Laporan	1.062.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	49 Kali dan 40 Kali	250.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	89 Laporan	123.413.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100.00 %	463.400.220	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	14 Jenis	298.832.973	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa	1.400 Surat	45.500.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belopa	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa	1.500 Laporan	16.772.426	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	58.400.020	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belopa	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Laporan	92.460.547	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	20 org 11 org 11 unit	359.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belopa	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	288 Laporan	189.600.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belopa	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	72.329.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belopa	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19 Unit	76.231.959	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	19 unit	59.789.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belopa	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	19 Unit	62.986.815	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15 Unit	1.735.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belopa	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	34 Unit	6.510.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 bangunan	12.540.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belopa	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	6.735.144	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan	100.00 %	116.656.450	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan	80 %	29.798.982	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)		Jumlah KAT Dalam Daerah Kabupaten yang Telah Memiliki Kemandirian Sebagai Warga Negara					Jumlah KAT Dalam Daerah Kabupaten yang Telah Memiliki Kemandirian Sebagai Warga Negara	1 Komunitas	2.998.301	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT							Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Keluarga	2.998.301	
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100.00 %	116.656.450	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	2 PSKS	26.800.681	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Mahasiswa pra sejatera yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	22 org	101.255.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	13.467.574	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Luwu	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan LK3	10 kk	15.400.650	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Luwu	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	13.333.107	
	Program Penagnan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	100.00 %	13.360.350	Program Penagnan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	100.00 %	9.085.999,-	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di Daerah Kabupaten dari Titik Debarkasi	100.00 %	13.360.350	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkandari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	9.085.999,-	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Luwu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	7 orang	13.360.350	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Luwu	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	1 Orang	9.085.999,-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Tertangani	100.00 %	148.018.000	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Tertangani	80 %	64.421.758	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	100.00 %	137.471.450	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	5 Layanan	55.562.272	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Luwu	Jumlah Anak terlantar, Disabilitas dan Lansia terlantar luar panti yang menerima bantuan permakanan	50 Orang	27.873.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Luwu	Jumlah Anak terlantar, Disabilitas dan Lansia terlantar luar panti yang menerima bantuan permakanan	20 Orang	13.199.016	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Luwu	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia yang diReunifikasi dengan Keluarga	10 Orang	14.411.800	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Luwu	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia yang diReunifikasi dengan Keluarga	10 Orang	11.594.516	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Luwu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual	6 orang	20.050.600	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Luwu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual	5 Orang	13.179.059	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Luwu	Jumlah penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	10 orang	65.760.550	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Luwu	Jumlah penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	1025 Orang	17.589.681	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	100.00 %	10.546.550	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	1 Layanan	8.859.486	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Ponrang	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan	1 Kali	10.546.550	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Ponrang	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan	50 Orang	8.859.486	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100.00 %	256.001.190	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 %	510.536.270	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin	100.00 %	256.001.190	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin	2 Layanan	510.536.270	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pengelolaan data fakir miskinnya	227 Desa/Kel	175.500.650	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pengelolaan data fakir miskinnya	60000 Keluarga	55.867.368	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Luwu	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan PKH dan Sembako Pangan dan bantuan penyelesaian study	18.070 orang dan 23.477 KK	80.500.540	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Luwu	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan PKH dan Sembako Pangan	60000 Keluarga	454.668.902	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Penanganan Bencana		Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana lingkup kabupaten	100.00 %	81.620.500	Program Penanganan Bencana		Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana lingkup kabupaten	100 %	252.468.800	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	100.00 %	55.670.500	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	15 Layanan	50.871.219	
	Penyediaan Makanan	Kab. Luwu	Jumlah Korban Bencana yang disediakan kebutuhan makannya	75 orang	55.670.500	Penyediaan Makanan	Kab. Luwu	Jumlah Korban Bencana yang disediakan kebutuhan makannya	250 Orang	50.871.219	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kampung siaga bencana lingkup kabupaten	100.00 %	25.950.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah kampung siaga bencana lingkup kabupaten	1 Layanan	201.597.581	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Luwu	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kampung siaga bencana	30 orang	25.950.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Luwu	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kampung siaga bencana	30 orang	201.597.581	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	100.00 %	25.570.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten	85 %	26.717.500	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	100.00 %	25.570.000	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	100 %	26.717.500	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Belopa	Luas TMP yang dipelihara	8880 m2	25.570.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Belopa	Luas TMP yang dipelihara	1 Makam	26.717.500	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga dilakukan secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Luwu tentunya perlu mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat selain program dan kegiatan yang telah di rumuskan oleh Dinas Sosial Kab. Luwu terkait rencana pencapaian target RPJMD Kab. Luwu dan Renstra Dinas Sosial Kab. Luwu tahun 2019-2024.

TABEL. 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin		
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah mahasiswa pra sejahtera yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	60000 Keluarga	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidak mampuan sosial ekonomi, dan pengabdian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sukar terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan Sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan Sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Sosial tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif
2. Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial.

Sasaran yang ingin dicapai sesuai Renstra Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT
3. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Tabel. 3.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANS RELIGI			
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel			
Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik;			
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan pemenuhan hak sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT	Memantapkan Kebutuhan kualitas hidup dan akses bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public, dan jaminan kesejahteraan social serta peningkatan pemberdayaan bagi PMKS dan KAT	Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public dan jaminan kesejahteraan sosial
			Peningkatan Pemberdayaan bagi PMKS dan KAT
	Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial	Memantapkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Tagana
			Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana

Tabel. 3.2

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi

Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Inovatif dan Responsif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100	Sekretariat	Belopa
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja		Sub. Program	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	-		Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	-		Belopa
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Belopa
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan		Sub. Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN			Belopa
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi			Belopa
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Bahan tanggapan pemeriksaan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Tanggapan Pemeriksaan	yang dikelola dan disiapkan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun			Belopa
		Administrasi Barang Milik Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD		Sub. Kepegawaian	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah			Belopa
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian		Sub. Kepegawaian	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Belopa
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi perangkat umum perangkat daerah		Sub. Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Belopa
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material kebutuhan kantor yang disediakan			Belopa

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makan dan minum yang disediakan			Belopa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa			Belopa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik			Belopa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor			Belopa
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dan disediakan jasa pajak dan perizinannya			Belopa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara			Belopa
Meningkatkan pemenuhan hak Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan PMKS dan KAT	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima jasa			Kab. Luwu
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan LK3			Kab. Luwu
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani			
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Kabupate/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di Daerah Kabupaten dari Titik Debarkasi			
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya ke desa/kelurahan asal dari titik debarkasi			Kab. Luwu
		Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak terlantar, Disabilitas dan Lansia terlantar luar panti yang menerima bantuan permakanan			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang meneri Alat Bantu			Kab. Luwu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia yang diReunifikasi dengan Keluarga			Kab. Luwu
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual			Kab. Luwu
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan			Kab. Luwu
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan			Kab. Luwu
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pengelolaan data fakir miskinnya			Kab. Luwu
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitasi bantuan PKH dan			Kab. Luwu

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
			Sembako Pangan			
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP yang dipelihara			Kab. Luwu
	Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial	Program Penanganan Bencana	Cakupan penyelenggaraan penanganan bencana lingkup kabupaten			Kab. Luwu
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial			
		Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang disediakan kebutuhan makannya			Kab. Luwu
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana lingkup kabupaten			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang aktif			Kab. Luwu

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2024, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2024 dibagi 2 (dua) yaitu Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non-Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Dearah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Bahan/Material
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan
 - a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 1) Penyediaan Makanan
- 2) Penyediaan Alat Bantu
- 3) Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga
- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 5) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Makanan
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
6. Program Pengelolaann Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Selatan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Beberapa program dan kegiatan perubahan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	6	7	8	9
1 06	DINAS SOSIAL				4.876.245.268		5.770.500.000
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah	%	100	3.983.215.959		4.784.500.000
1 06 01 06 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	28.263.416		29.500.000
1 06 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan Perubahan Renja yang dibuat	Jenis	12	14.085.701		15.000.000
1 06 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	1.185.270		1.000.000
1 06 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1.393.655		1.000.000
1 06 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1.181.925		2.000.000
1 06 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1.230.825		1.000.000
1 06 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	laporan	42	9.186.040		9.500.000
1 06 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan		100	3.373.203.956		4.106.000.000
1 06 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	OB	34	3.214.383.000		4.000.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1 06 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Dokumen	3	153.960.000		100.000.000
1 06 01 2 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	3	1.169.343		2.000.000
1 06 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	14	3.691.613		4.000.000
1 06 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%	100	6.510.127		7.000.000
1 06 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	6.510.127		7.000.000
1 06 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum	Jenis	8	200.173.528		244.000.000
1 06 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Paket	9	2.822.400		4.000.000
1 06 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	20.073.000		40.000.000
1 06 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	11	9.561.250		11.000.000
1 06 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Dokumen dan Penggandaan	Paket	5	2.999.656		4.000.000
1 06 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran, Majalah, dan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	10	14.400.000,		12.000.000
1 06 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang akan diadakan	Paket	54	25.841.722		30.000.000
1 06 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Tamu yang disediakan	Laporan	3	1.062.500		3.000.000
1 06 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	89	123.413.000,		140.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1 06 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	14	298.832.973		302.000.000
1 06 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang terkirim	Laporan	1500	16.772.426		17.000.000
1 06 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Lpaoran	12	92.460.547		95.000.000
1 06 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Lpaoran	288	189.600.000		190.000.000
1 06 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	19	76.231.959,		96.000.000
1 06 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil Dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Unit	19	62.986.815		70.000.000
1 06 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	34	6.510.000,		6.000.000
1 06 01 2 09 ##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	6.735.144		20.000.000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%	80	29.798.982		37.000.000
1 06 02 2 01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)	Jumlah KAT Dalam Daerah Kabupaten yang Telah Memiliki Kemandirian Sebagai Warga Negara	Kmunitas	1	2.998.301		4.000.000
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1	2.998.301		4.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1 06 02 2 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	PSKS	2	26.800.681		33.000.000
1 06 02 2 03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima jasa	Orang	19	13.467.574		15.000.000
1 06 02 2 03 04	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan LK3	Sertifikat	20	13.333.107,		18.000.000
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar Kasih di Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	9.085.999		11.000.000
1 06 03 2 01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pelayanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di Daerah Kabupaten dari titik Debarkasi	Orang	1	9.085.999		11.000.000
1 06 03 2 01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	orang	1	9.085.999		11.000.000
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	80	64.421.758		76.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1 06 04 2 01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	Layanan	5	55.562.272		64.000.000
1 06 04 2 01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak terlantar, Disabilitas dan Lansia terlantar luar panti yang menerima bantuan permakanan	Orang	50	13.199.016		14.000.000
1 06 04 2 01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia yang diReunifikasi dengan Keluarga	orang	10	11.594.516		15.000.000
1 06 04 2 01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Bimtek	orang	5	13.179.059		16.000.000
1 06 04 2 01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	1025	17.589.681		19.000.000
1 06 04 2 02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Layanan	1	8.859.486		12.000.000
1 06 04 2 02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan	Orang	50	8.859.486		12.000.000
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Masyarakat Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	80	510.536.270		563.000.000

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (dalam rupiah rupiah)			
				2024		2025	
				Target	Rp.	Target	Rp.
1 06 05 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Miskin yang menerima bantuan sosial dan terdata	Layanan	2	510.536.270		563.000.000
1 06 05 2 02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Penerima Program PBI JK, PKH, KKS, BSP dan Perlindungan Sosial lainnya	Kelurga	60000	55.867.368		63.000.000
1 06 05 2 02 03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Bantaun Sosial Kesejahteraan Keluarga (PKH, Sembako dan Bantuan Penyelesaian Study)	Kelurga	60000	454.668.902		500.000.000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	%	100	252.468.800		265.000.000
1 06 06 2 01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya	Layanan	15	50.871.219		60.000.000
1 06 06 2 01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Makanan	Orang	250	50.871.219		60.000.000
1 06 06 2 02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana yang diberdayakan	Layanan	1	201.597.581		205.000.000
1 06 06 2 02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana/ Dan Jumlah Tagana yang dilatih	Orang	30	201.597.581		205.000.000
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	85	26.717.500		34.000.000
1 06 07 2 01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	%	100	26.717.500		34.000.000
1 06 07 2 01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari yang terlaksana	Makam	1	26.717.500		34.000.000

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
KABUPATEN LUWU

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024 DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 06	DINAS SOSIAL					4.876.245.268		5.770.500.000
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah	%		100	3.983.215.959	100	4.784.500.000
1 06 01 06 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		100	28.263.416	100	29.500.000
1 06 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan Perubahan Renja yang dibuat	Jenis	Belopa	12	14.085.701	2	15.000.000
1 06 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	Belopa	4	1.185.270	1	1.000.000
1 06 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	Belopa	1	1.393.655	1	1.000.000
1 06 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	Belopa	1	1.181.925	1	2.000.000
1 06 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	Belopa	1	1.230.825	1	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	Laporan	Belopa	42	9.186.040	2	9.500.000
1 06 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan			100	3.373.203.956	100	4.106.000.000
1 06 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	OB	Belopa	34	3.214.383.000	384	4.000.000.000
1 06 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Dokumen	Belopa	3	153.960.000	3	100.000.000
1 06 01 2 02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	Belopa	3	1.169.343	3	2.000.000,
1 06 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	Belopa	14	3.691.613	14	4.000.000
1 06 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%		100	6.510.127	100	7.000.000
1 06 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Belopa	1	6.510.127	1	7.000.000
1 06 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum	Jenis		8	200.173.528	100	244.000.000
1 06 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	Paket	Belopa	9	2.822.400	9	4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Belopa	3	20.073.000	10	40.000.000
1 06 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Belopa	11	9.561.250	11	11.000.000
1 06 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Dokumen dan Penggandaan	Paket	Belopa	5	2.999.656	4	4.000.000
1 06 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran, Majalah, dan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	Belopa	10	14.400.000	8	12.000.000
1 06 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang akan diadakan	Paket	Belopa	54	25.841.722	54	30.000.000,
1 06 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Tamu yang disediakan	Laporan	Belopa	3	1.062.500	2	3.000.000
1 06 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	Belopa	89	123.413.000	32	140.000.000
1 06 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		14	298.832.973	100	302.000.000
1 06 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang terkirim	Laporan	Belopa	1.500	16.772.426	1.400	17.000.000,
1 06 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Laporan	Belopa	12	92.460.547	3	95.000.000
1 06 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Laporan	Belopa	288	189.600.000	16	190.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		19	76.231.959	100	96.000.000
1 06 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil Dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Unit	Belopa	19	62.986.815	17	70.000.000
1 06 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	Belopa	34	6.510.000	15	6.000.000
1 06 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terpelihara	Unit	Belopa	1	6.735.144	1	20.000.000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	%		80	29.798.982	95	37.000.000
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat (KAT)	Jumlah KAT dalam daerah kabupaten yang telah memiliki kemandirian sebagai warga negara	Komunitas		1	2.998.301		4.000.000
	Fasilitas Pemeberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan	Keluarga		1	2.998.301		4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		kabupaten/kota						
1 06 02 2 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	PSKS	Kab. Luwu	2	26.800.681	100	33.000.000
1 06 02 2 03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima jasa	Orang	Belopa	19	13.467.574	15	15.000.000
1 06 02 2 03 04	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan LK3	Sertifikat	Kab. Luwu	20	13.333.107	10	18.000.000
1 06 03	PROGRAM PENANGANANWARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							11.000.000
1 06 03 2 01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.06.03.2.01.0001						11.000.000
1 06 03 2 01 0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi	<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang</i>	Orang	Kab. Luwu	1	9.085.999		11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>dipulangkandari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%		80	64.421.758	100	76.000.000
1 06 04 2 01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya	Layanan	Kab. Luwu	5	55.562.272	85	64.000.000
1 06 04 2 01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak terlantar, Disabilitas dan Lansia terlantar luar panti yang menerima bantuan permakanan	Orang	Kab. Luwu	20	13.199.016	85	14.000.000
1 06 04 2 01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Kab. Luwu	10	11.594.516	10	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 04 2 01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Kab. Luwu	5	13.179.059	198	16.000.000
1 06 04 2 01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Datadan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Kab. Luwu	1025	17.589.681		19.000.000,
1 06 04 2 02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Layanan	Kab. Luwu	1	8.859.486		12.000.000
1 06 04 2 02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan	Orang	Kab. Luwu	50	8.859.486	2	12.000.000
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Masyarakat Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		80	510.536.270	85	563.000.000
1 06 05 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Miskin yang menerima bantuan sosial dan terdata	Layanan	Kab. Luwu	2	510.536.270		563.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024					DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1 06 05 2 02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Penerima Program PBI JK, PKH, KKS, BSP dan Perlindungan Sosial lainnya	Keluarga	Kab. Luwu	60.000	55.867.368	22	63.000.000		
1 06 05 2 02 03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Bantaun Sosial Kesejahteraan Keluarga (PKH, Sembako dan Bantuan Penyelesaian Study)	Keluarga	Kab. Luwu	60.000	454.668.902	3	500.000.000		
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	%		100	252.468.800	100	265.000.000		
1 06 06 2 01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya	Layanan	Dinas Sosial	15	50.871.219	80	60.000.000		
1 06 06 2 01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Makanan	Orang	Kab. Luwu	250	50.871.219	80	60.000.000		
1 06 06 2 02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana yang diberdayakan	Layanan	Kab. Luwu	1	201.597.581	75	205.000.000		
1 06 06 2 02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana/ Dan Jumlah Tagana yang dilatih	Orang		30	201.597.581	30	205.000.000		
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%		85	26.717.500	85	34.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA AWAL TAHUN 2024		DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2025		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 07 2 01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman makam Pahlawan yang dipelihara	%	Dinas Sosial	100	26.717.500	100	34.000.000
1 06 07 2 01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas TMP yang dipelihara	Makam	Kec. Belopa	1	26.717.500	1	34.000.000



BAB V PENUTUP

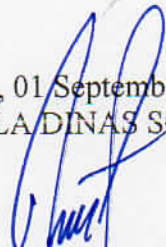
Rencana kerja Dinas Sosial tahun 2024 adalah merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomi untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang tidak terlepas dari rencana strategi OPD tahun 2019 – 2024 dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tingkat kecamatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap stakeholders (Pihak yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Sosial. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja), maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan terkecuali jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat.
4. Pengevaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian kinerja seluruh aparat.

Semoga Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

Belopa, 01 September 2023
KEPALA DINAS SOSIAL



JOHAN DAIDO, S. Sos., M. Si
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196712271991031011